PROTO-APOKALIPS

ZINE

Pandemi Covid-19
dan Reproduksi Sosial di Indonesia (Sebuah Amatan)

Oleh: Viona Mahardika Harjuni

Di masa pandemi, kita sudah tak asing lagi dengan berbagai pemberitaan mengenai kenaikan jumlah kasus positif dan kasus kematian akibat covid-19, jatuh bangunnya sistem pelayanan kesehatan akibat pandemi, gugurnya para pekerja garda terdepan penanganan pandemi, masalah pengangguran, dlsb. Tak hanya itu, Pandemi Covid-19 juga sejatinya telah mengubah cara hidup manusia hingga derajat tertentu. Seperti kebijakan lockdown yang diterapkan oleh berbagai negara, atau dalam konteks dalam negeri dikenal dengan sebutan PSBB, telah mengubah bagaimana masyarakat menjalankan setiap aktivitas keseharian secara online. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara online tersebut antara lain bekerja dari rumah (Work from Home), belajar dari rumah (Learn from Home), aktivitas belanja kebutuhan harian yang sudah mulai banyak dilakukan dari rumah melalui platform marketplace, pengutamaan layanan jasa pengantaran makanan dan minuman secara online, dlsb. Ranah reproduksi sosial pun semakin berperan penting dalam menopang serta memelihara kehidupan sosial di masa pandemi serta penanganan pandemi itu sendiri. Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menuliskan sebuah amatan mengenai bagaimana keterhubungan antara pandemi Covid-19 dan reproduksi sosial di Indonesia. Adapun dalam proses penulisan sebuah amatan singkat ini, penulis akan memulai dengan pemaparan singkat mengenai pandemi secara umum yang terjadi di Indonesia, serta reproduksi sosial dan keterhubungannya dengan pandemi Covid-19 dalam konteks Indonesia.A. Gambaran Umum Pandemi Covid-19 di Indonesia

Sebagaimana telah kita ketahui, penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi pada awal tahun 2020. Dilansir melalui Kompas.com, 2 Maret 2020 merupakan hari di mana untuk pertama kalinya dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden. Setelah adanya konfirmasi dari pihak negara mengenai ditemukannya kasus positif di Indonesia, fenomena-fenomena seperti panic buying, kelangkaan masker dan alat pelindung diri di pasaran, konspirasi akan Covid-19 yang berujung pada maraknya penyebaran misinformasi, serta stigmatisasi terhadap penyintas Covid-19 menjadi konsekuensi yang dialami Indonesia akibat penanganan pandemi yang lamban dan kurang tanggap dalam edukasi sosial terkait pandemi terhadap masyarakat.

Lantas, apa saja yang mendasari penilaian lamban atas penanganan pandemi sebagaimana telah disinggung di atas? Penulis mengira bahwa sikap penyangkalan yang dilakukan pemerintah sejak awal pandemi; pendekatan militeristik dalam menangani pandemi; pengutamaan kepentingan ekonomi dan rendahnya pengutamaan riset berbasis sains dalam menangani pandemi merupakan faktor-faktor fundamental yang memengaruhi lambannya penanganan pandemi di Indonesia.

1. Penyangkalan Pemerintah Indonesia pada Masa-Masa Awal Sebelum Pandemi

Pertama-tama, dalam paragraf ini, penulis akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat kita ketahui pula melalui sikap serta pernyataan Menteri Kesehatan yang menjabaat saat masa-masa awal pandemi yakni Terawan Agus Putranto. Dilansir melalui Kompas.com, dinyatakan bahwa sejak sebelum pengumuman kasus positif pertama secara resmi di Indonesia, Terawan sebagai eks Menteri Kesehataan saat itu kerapkali memberikan komentar yang menuai polemik. Pasalnya, komentar-komentar yang ia ujarkan sebagai Menteri Kesehatan justru sama sekali tidak menekankan kewaspadaan serta kesiap-siagaan Indonesia menghadapi penyebaran virus Covid-19 yang telah terjadi di berbagai negara sebelumnya, melainkan cenderung menyangkal kemungkinan penyebaran virus di Indonesia dengan dalih kekuatan doa masyarakat yang mampu menyangkal virus serta menganggap bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang bisa sembuh dengan sendiri. Padahal, peran Menteri Kesehatan tentunya begitu vital dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Alhasil, minimnya pembacaan objektif terhadap potensi penyebaran virus telah berdampak pada minimnya tindakan-tindakan preventif penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Indonesia pun didera kenaikan kasus positif yang tinggi.

2. Pendekatan Militeristik dalam Menangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia cenderung mengutamakan pendekatan militeristik dalam penanganan pandemi Covid-19. Sekalipun dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional non-alam dengan status kedaruratan kesehatan, namun keterlibatan militer dalam penanganan pandemi justru jauh lebih besar dibandingkan keterlibatan ilmuan, ahli virologi dan epidemiologi, serta tenaga kesehatan.

.Seperti halnya peran Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali justru diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Menko Maritim dan Investasi, bukannya diberikan kepada sosok dengan latar belakang keahlian di bidang kesehatan. Adapun secara umum, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia secara masif dilakukan dengan penjagaan keamanan oleh militer di ruas-ruas jalan, razia-razia terhadap pelanggar aturan PPKM, serta penyemprotan desinfektan menggunakan mobil water cannon di jalanan terbuka. Akan tetapi, di sisi lain, keadaan sistem kesehatan di Indonesia sempat berada pada titik collapse akibat lonjakan kasus yang tinggi setiap harinya, keterisian Bed Occupancy Rate di tiap-tiap Rumah Sakit yang bahkan melebihi kapasitas saat Indonesia mengalami gelombang satu dan dua pandemi hingga kelangkaan oksigen. Tentu, melalui amatan umum seorang warga negara seperti yang penulis lakukan di atas cukup menguatkan pandangan penulis, bahwa pendekatan militeristik dalam penanganan pandemi Covid-19 bukanlah solusi.

3. Pengutamaan Kepentingan Ekonomi Bisnis dan Rendahnya Pengutamaan Riset Berbasis Sains dalam Menangani Pandemi

Dilansir melalui Kompas.id, angka pengangguran meningkat akibat pandemi Covid-19, banyak pekerja baik pekerja formal maupun informal kehilangan pekerjaanya akibat pandemi-Covid-19 tersebut. Hal ini berpengaruh pada daya beli masyarakat akibat menurunnya bahkan hilangnya pemasukan karena berkurangnya penyerapan tenaga kerja akibat pandemi, padahal di sisi lain, dukungan pertumbuhan ekonomi nasional paling banyak melalui konsumsi rumah tangga. Sehingga, pandemi Covid-19 yang telah memasuki Indonesia terbukti menghantam situasi perekonomian Indonesia, khususnya bagaimana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II mengalami pertumbuhan negatif, yang mana kemudian secara berkala Indonesia mampu melakukan pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, jika melihat kondisi objektif Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, penulis melihat bahwa terdapat kecenderungan pemerintah Indonesia mengutamakan kepentingan ekonomi dan menomorduakan sistem kesehatan. Hal ini disebabkan pula pemerintah kerapkali memberi kelonggaran terhadap kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan dalih roda ekonomi harus tetap berputar. . Padahal, kebijakan PSBB atau lockdown dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan langkah utama yang harus digalakkan demi menekan laju penyebaran virus.. Sehingga, sistem kesehatan sebagai frontline penanganan pandemi Covid-19 dapat lebih fokus menangani pasien dan mendapat perlindungan tenaga kesehatan tanpa resiko yang tinggi atas collapse-nya sistem kesehatan.

Selain itu, dalam sebuah artikel Tempo.co, dinyatakan pula bahwa kebijakan PSBB kerapkali berubah nama, mulai dari PSBB, PSBB transisi, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM varian level yakni PPKM level 3 dan 4. Pasalnya, apa yang sebenarnya mendasari tiap-tiap perubahan nama kebijakan pembatasan mobilitas serta aktivitas keramaian di atas? Sebab, dalam rentang waktu terdapat perubahan nama kebijakan-kebijakan di atas, pada dasarnya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan yang fundamental. Seperti minimnya pengetesan dan pelacakan secara masif dan berkala, serta vaksinasi yang merata. Tentu jika kita melihat kebelakang hingga hari ini, salah satu penanda perubahan nama serta kecenderungan kelonggaran PSBB tersebut yakni aspek ekonomi nasional. Sebab, pembatasan mobilitas masyarakat sangat memengaruhi aspek ekonomi nasional seperti turunnya konsumsi rumah tangga serta banyak sektor ekonomi yang ditutup dikarenakan adanya pembatasan mobilitas masyarakat.
Padahal, tanpa adanya pengetesan dan pelacakan secara masif dan berkala serta vaksinasi yang merata, pelonggaran PSBB yang memiliki konsekuensi terhadap tingginya mobilitas publik memiliki resiko yang tak bisa disepelekan. Sebab, mobilitas tersebut meninggikan pula resiko penyebaran Covid-19 serta probabilitas munculnya varian-varian virus baru.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia memiliki kecenderungan lebih mengutamakan aspek kepentingan ekonomi. Adapun kerapkali kebijakan-kebijakan yang diambil, tak sekalipun mengutamakan riset-riset ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan serta epidemiologi. Melalui gambaran penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah disinggung sebelumnya, dapat diamati pula bahwa posisi tawar serta peran dari otoritas kesehatan begitu rendah. Padahal, sudah semestinya pemegang otoritas penanganan pandemi lebih banyak dilimpahkan kepada para tenaga medis serta para ilmuan yang memang pakar di bidangnya, yang selanjutnya baru lah dikaji secara lebih lanjut secara kolektif dan kolaboratif dengan keterlibatan ahli di berbagai sektor lainnya. Dengan mengutamakan riset berbasis sains dalam menangani pandemi Covid-19, tentu saja dampak dari sisi kebijakan yang dibentuk menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penguatan edukasi sosial mengenai virus Covid-19 ini dapat terjadi secara optimal sehingga mampu mematahkan narasi-narasi misinformasi tentang covid-19 yang marak tersebar.
Memang betul, pandemi covid-19 pada dasarnya telah mengungkap sebuah krisis yang multifaset di tengah masyarakat kita. Dalam hal ini, tak hanya krisis kesehatan, melainkan juga krisis dalam sektor ekonomi, serta aspek lainnya.

Namun, apakah tepat menyikapi pandemi Covid-19 hanya menggunakan kacamata ekonomi bisnis?

B. Reproduksi Sosial dan Keterhubungannya dengan Pandemi Covid-19 dalam Konteks Indonesia

Reproduksi sosial masih menjadi aspek yang kerapkali dipinggirkan, padahal reproduksi sosial memiliki fungsi vital dalam menopang serta memelihara seluruh kehidupan sosial masyarakat. Reproduksi sosial sebagaimana dinyatakan oleh Fraser dalam artikel Dissent Magazine merupakan sebuah proses tentang bagaimana suatu ikatan sosial tercipta dan terpelihara, seperti halnya proses kelahiran, proses membesarkan anak, perawatan lansia hingga menopang kehidupan sosial dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan pertemanan hingga lingkungan dengan jangkauan yang lebih besar seperti kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pengertian yang telah dinyatakan sebelumnya, dapat diamati bahwa tanpa adanya pekerjaan rumah tangga, pekerjaan membesarkan anak, pendidikan, layanan kesehatan, perawatan bagi lansia serta kerja-kerja reproduktif lainnya, aktivitas produksi ekonomi tak akan mungkin bisa berjalan secara maksimal. Sebab, kerja-kerja reproduktif yang terhubung dalam reproduksi sosial tersebut berfungsi sebagai latar belakang kondisi, regenerasi kebutuhan atas pekerja, serta pemeliharaan ikatan sosial secara berkelanjutan bagi aktivitas produksi ekonomi (Dissent Magazine).

Mengingat dalam ranah reproduksi sosial terdapat kerja-kerja tertentu (kerja reproduktif) sebagaimana telah disinggung dalam paragraf sebelumnya, pada kenyataannya kerja-kerja reproduktif, ternyata memiliki berbagai permasalahannya tersendiri. Terdapat bentuk kerja-kerja reproduktif yang dibayar dan yang tak dibayar. Sektor kerja perawatan dalam bidang kesehatan, perawatan anak dan lansia, layanan makanan, layanan reparasi, layanan bersih-bersih, dan lain lain kecuali sektor rumah tangga termasuk sektor kerja-kerja reproduktif yang dibayar. Namun kondisi di mana terdapat separasi antara rumah tangga dengan kerja reproduktif dalam pasar tenaga kerja global tersebut, dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang mapan saat ini (kapitalisme neoliberal) yang turut melanggengkan penindasan terhadap perempuan dan minoritas gender lainnya, penindasan berbasis ras, serta penindasan berbasis kelas. Salah satu landasan mengapa sistem kapitalisme neoliberal bersifat eksploitatif dan justru memprekarisasi ranah reproduksi sosial, dapat kita amati melalui pemaparan Davies (2014: 310) yang menyatakan bahwa sistem ekonomi neoliberalisme cenderung mengutamakan kompetisi pasar bebas;

melakukan reformasi kebijakan yang berorientasi pada pasar dengan menghilangkan kontrol harga, deregulasi pasar modal dan menurunkan hambatan perdagangan; serta mengurangi pengaruh negara dalam perekonomian dengan melakukan privatisasi dan penghematan. Adapun dalam kebijakan neoliberal, institusi dan aktivitas yang berada di luar sistem pasar seperti universitas, rumah tangga, administrasi publik, serta serikat pekerja ditarik ke dalam fungsi pasar (Davies, 2014: 310). Sehingga, sektor-sektor publik yang semula menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin penghidupan serta kesejahteraan warga negara telah diprivatisasi ke dalam pasar, yang mana hal ini berarti setiap masyarakat yang memerlukan akses layanan kesehatan, pendidikan, dlsb, diharuskan membayar untuk mendapatkan akses tersebut. Tanggung jawab dasar atas sektor publik pun dipindahkan menjadi tanggung jawab masing-masing masyarakat. Berdasarkan pemaparan dalam paragraf ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi neoliberal bukanlah sistem yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, namun merupakan sebuah sistem yang pada dasarnya hanya terus-terusan mengutamakan kepentingan pasar dan pemaksimalan keuntungan bagi korporasi.

Selanjutnya, mengingat reproduksi sosial memiliki peranan vital dalam memelihara serta menopang keseluruhan kehidupan sosial, lantas bagaimana nasib ranah reproduksi sosial dalam kapitalisme neoliberal? Sekalipun reproduksi sosial dipahami sebagai latar belakang kondisi bagi kemungkinan adanya aktivitas produksi ekonomi, pada kenyataannya proses tersebut masih sering dipinggirkan serta dianggap remeh keberadaannya. Yang menjadi permasalahan yakni kerja-kerja reproduktif dianggap terpisah dengan aktivitas produksi ekonomi. Pemisahan tersebut disinyalir oleh Fraser dalam artikel New Left Review sebagai pemicu krisis reproduksi sosial. Produksi ekonomi bergantung pada reproduksi sosial demi menopang kebutuhan produksi, namun ia mengabaikan setiap kapasitas dari reproduksi sosial itu sendiri demi mengutamakan pengakumulasian kapital tiada henti. Melalui situasi tersebut, terciptalah “kontradiksi sosial”, di mana logika produksi ekonomi mengesampingkan logika reproduksi sosial (New Left Review). Sehingga, pengabaian terhadap nilai serta aturan dasar dalam reproduksi sosial oleh produksi ekonomi kapitalis justru berpotensi menciptakan krisis bagi aktivitas produksi itu sendiri. Sebagaimana krisis reproduksi sosial sejatinya telah terjadi sejak lama — sejauh ia telah dipinggirkan dari produksi ekonomi, kini, krisis reproduksi sosial terungkap semakin jelas di masa pandemi Covid-19 ini.

Adapun krisis reproduksi sosial dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, dapat diamati lebih jauh dengan menelaah bagaimana kerja-kerja reproduktif sosial pada aspek rumah tangga dan pasar tenaga kerja.

1. Aspek Rumah Tangga
Pandemi Covid-19 tak terelakkan lagi telah memaksa umat manusia untuk membatasi mobilitas serta keramaian, hal ini disebabkan penyebaran virus Covid-19 masih terus terjadi hingga saat ini. Mulai dari pekerjaan hingga pembelajaran sekolah pun ditekankan untuk dilakukan secara daring. Bahkan, dapat dikatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai menghadapi pemaksimalan digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak pula platform digital yang semakin terus dikembangkan untuk membantu masyarakat mempermudah memenuhi kebutuhan harian dari rumah, seperti platform layanan pengantaran barang dan makanan, telemedicine, layanan edukasi formal dan non-formal secara online, pertemuan dalam secara daring, serta marketplace yang menyediakan ruang agar siapapun dapat membeli berbagai kebutuhan harian secara online. Akhirnya, cara hidup serta kebiasaan masyarakat pun mulai bergeser kepada pemaksimalan digitalisasi guna memenuhi kebutuhan harian cukup dari rumah.

Memang hal tersebut memudahkan serta memberikan efisiensi lebih bagi sebagian masyarakat, namun tak sedikit pula yang justru mengalami posisi makin rentan akibat pengalihan serta pemusatan aktivitas harian dari rumah. Seperti halnya ibu rumah tangga, dengan pengalihan pembelajaran sekolah serta pekerjaan dari rumah, secara tak langsung hal ini meletakkan beban lebih kepada ibu rumah tangga. Mengapa secara spesifik ibu rumah tangga? Sebab, secara umum kerja-kerja reproduktif dalam rumah tangga kerapkali dilakukan oleh peremuan dalam suatu keluarga. Domestikasi yang telah dialami oleh perempuan setelah sekian lama menjadi salah satu faktor bagaimana pelekatan kerja reproduktif kepada perempuan (feminization of labour) terjadi. Perempuan dinormalisasi oleh lingkungan sosialnya untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang sifatnya merawat serta menjaga sebagai kodrat perempuan

seperti memasak, mencuci, menyapu, mengepel dll. Lalu, yang menjadi persoalan adalah ibu rumah tangga kerapkali dianggap tidak melakukan kerja, dan hanya suami lah yang melakukan kerja demi memberi nafkah. Di masa pandemi Covid-19 ini, krisis reproduksi sosial dalam skala rumah tangga semakin terlihat jelas, dan yang paling rentan menanggung beban serta konsekuensi baik secara fisik akibat kerja-kerja domestik yang tak terbatas waktu serta secara mental yaitu ibu rumah tangga.

Normalisasi kerja reproduktif sebagai kodrat bagi perempuan justru mengaburkan pemahaman atas bentuk kerja itu sendiri. Hal ini dikarenakan, sejatinya ibu rumah tangga melakukan kerja reproduktif yang justru bahkan tidak dibayar. Padahal sejatinya kerja-kerja domestik serta kerja perawatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada dasarnya adalah kerja.

Belum lagi jika kita mengamati kasus keluarga dengan dual income, yang mana terdapat dua pencari nafkah dalam suatu keluarga, baik sang ayah maupun sang ibu. Kondisi tersebut tak dapat hanya dipahami sebagai suatu pencapaian akan kesetaraan di mana baik laki-laki maupun perempuan saat ini memiliki kesempatan kerja yang sama. Pasalnya justru terdapat kerentanan bagi pihak perempuan di mana mayoritas perempuan yang bekerja memikul pula tanggung jawab rumah tangga yang disebut pula sebagai beban ganda (double burden). Tak semua orang mampu membayar berbagai jasa bersih-bersih dan perawatan rumah tangga. Pada akhirnya, pihak perempuan melakukan dua pekerjaan sekaligus, baik kerja produktif maupun kerja reproduktif dalam rumah tangga. Di masa pandemi Covid-19, perempuan pekerja yang sekaligus menjalankan kerja-kerja reproduktif dalam rumah tangga berada pada kondisi yang semakin rentan.

Gambaran kerja reproduktif yang kerapkali dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut, dalam hal ini menyiratkan aspek kerja reproduktif yang secara tidak langsung dimediasi oleh pasar dan tidak dibayar (unwaged indirectly market-mediated) sebagaimana dinyatakan oleh Endnotes Collective (dalam Srnicek & Hester, 2017). Kerja-kerja reproduktif yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada dasarnya turut berkontribusi bagi keberlangsungan aktivitas produksi ekonomi dengan memberikan perawatan serta pemeliharaan atas regenerasi serta ketersediaan tenaga kerja yang secara tidak langsung dimediasi oleh pasar. Namun, ironisnya kerja-kerja reproduktif yang dilakukan oleh ibu rumah tangga masih dipinggirkan serta tidak dilihat sebagai kerja.

2. Aspek Pasar Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Endnotes Collective (dalam Srnicek & Hester, 2017) menyatakan bahwa aspek-aspek kerja reproduktif dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu yang secara langsung dimediasi oleh pasar (the directly market-mediated), yang secara tidak langsung dimediasi oleh pasar dan dibayar (the waged indirectly market-mediated), serta yang secara tidak langsung dimediasi oleh pasar dan tidak dibayar (the unwaged indirectly market-mediated).

Sebagaimana gambaran atas aspek kerja reproduktif yang dimediasi oleh pasar dan tidak dibayar telah dipaparkan melalui fenomena kerja ibu rumah tangga, aspek kerja reproduktif yang tidak secara langsung dimediasi oleh pasar namun upahnya dibayar, dinyatakan oleh Endnotes Collective (dalam Srnicek & Hester, 2017) melalui contoh pekerja perawat NHS (National Health Service) di Inggris. Pekerjaan yang dilakukan oleh perawat sejatinya tugas-tugas untuk reproduksi sosial — perawatan. Namun dibayarkan melalui upah. Adapun mekanisme pengupahan bagi pekerja perawat tidak secara langsung terikat pada logika akumulasi yang terjadi dalam pasar kapitalis, melainkan diambil dari perpajakan. Sementara itu, kerja reproduktif yang secara langsung dimediasi oleh pasar memiliki mekanisme pengupahan yang terikat secara langsung pada logika akumulasi yang terjadi di dalam pasar kapitalis (oleh korporasi). Sekalipun para pekerja dalam dua aspek kerja reproduktif ini mendapatkan upah, bukan berarti hal tersebut menjadi lebih baik atau bebas eksploitasi. Pasalnya, problem fleksibilisasi tenaga kerja, upah minim, jam kerja berlebih, serta problem jaminan sosial masih menghinggapi para pekerja di bawah sistem kapitalisme neoliberal saat ini.

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, khususnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini, sektor ekonomi perawatan — seperti kesehatan, pendidikan, perawatan anak dan lansia, layanan bersih-bersih, layanan penyedia makanan, layanan reparasi dlsb, menghadapi tantangan besar di masa pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, sektor ekonomi perawatan memiliki peranan vital dalam menopang serta memelihara keseluruhan kehidupan sosial sehingga aktivitas produksi ekonomi dapat berjalan. Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, pekerja sektor kesehatan — seperti pekerja perawat, dokter, serta pekerja rumah sakit, tak terelakkan lagi merupakan garda terdepan (front line) dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sejak awal pandemi hingga saat ini.

Namun yang terjadi, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pekerja sektor kesehatan yang secara langsung berhadapan dengan penyakit serta rentan terpapar virus Covid-19 tersebut masih kerap kali dipinggirkan dan mendapat perhatian. Seperti halnya problem insentif bagi para pekerja sektor kesehatan yang macet serta otoritas kesehatan memegang peran yang begitu minor dalam menyusun kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak sekali pekerja sektor kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan pula bagaimana sektor kesehatan memiliki peran paling penting dan mendasar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia namun masih seringkali tidak mendapat perlindungan dari negara.

Selanjutnya, para pekerja sektor kesehatan yang kerapkali rentan terpapar virus ini pun mengalami resiko tinggi pula dalam rumah tangga, sebab tak dapat dipungkiri kerja-kerja penanganan langsung pandemi Covid-19 di rumah sakit berdampak pada bagaimana para pekerja sektor kesehatan membatasi hubungan dengan rumah tangganya akibat resiko Covid-19, mereka pun memiliki tanggung jawab selain menangani pasien di rumah sakit, harus menjaga keluarganya dari paparan virus.

Hal serupa tentu berlaku bagi pekerja sektor ekonomi perawatan lainnya, seperti penyedia makanan, pekerja yang melakukan kerja membersihkan kota dan tempat umum, pekerja pendidikan, pekerja perawatan lansia dan anak, dll. Sebagai contoh pekerja bersih-bersih, tanpa kerja-kerja yang mereka lakukan, tentu kita bisa membayangkan bagaimana rupa kebersihan lingkungan sekitar kita. Pekerja bersih-bersih pun mengalami kerentanan yang sama terpapar virus karena selalu berhadapan dengan lingkungan sekitar serta ruang publik.

C. Penutup

Lantas, apakah hanya pekerja sektor perawatan saja yang berdampak paling rentan atas pandemi Covid-19 ini? Tentu tidak. Sebab, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia seperti yang telah kita ketahui, telah merentankan semua kelas pekerja akibat pengutamaan penanganan pandemi yang mengutamakan kepentingan ekonomi bisnis. Kelas pekerja telah dikondisikan untuk dapat terus bekerja di masa pandemi Covid-19 ini. Sebagaimana kebijakan PSBB makin longgar, para pekerja saat ini pun sudah banyak yang diharuskan untuk bekerja dari kantor kembali. Sehingga, pandemi Covid-19 pun pada dasarnya berdampak secara rentan pada semua kelas pekerja. Adapun poin penekanan ranah reproduksi sosial dalam tulisan ini, berguna untuk menegaskan bahwa kerja-kerja kasat mata — seperti perawatan, menyediakan makanan, bersih-bersih, dlsb yang termasuk dalam ranah reproduksi sosial, yang semula kerapkali dipinggirkan dan dipandang remeh dibandingkan aktivitas produksi sektor formal, pada dasarnya memiliki fungsi vital bagi produksi ekonomi serta penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kemudian dari itu, tulisan ini pun berupaya menekankan kembali bahwa kerja perawatan, baik yang dibayar ataupun tidak, sejatinya adalah kerja.

Sehingga, dapat disimpulkan pula bahwa terdapat kompleksitas permasalahan dalam kerja-kerja reproduktif yang selanjutnya berpotensi dalam menciptakan kondisi krisis reproduksi sosial. Sekelumit problem yang terjadi pada ranah reproduksi sosial pun berdampak bagi kelas pekerja, khususnya bagi pekerja perempuan yang rentan mengalami eksploitasi yang berlapis.

. Berangkat dari permasalahan yang dituliskan ini, penulis mencoba menegaskan kembali mengenai pentingnya wacana krisis reproduksi sosial sebagai bagian dari penguatan analisis dalam memaknai pandemi Covid-19 di Indonesia.

REFERENSI

Andryanto, S.D. (2021, Juli, 23). Gonta-ganti Istilah Penanganan Covid-19: PSBB Hingga Terkini PPKM Level 4. Tempo.co. Diambil dari Gonta-ganti Istilah Penanganan Covid-19: PSBB Hingga Terkini PPKM Level 4 — Nasional Tempo.co

Davies, W. (2014). Neoliberalism: A Bibliographic Review. Theory, Culture & Society, 31(7–8), 309–317. https://doi.org/10.1177/0263276414546383

Fraser, Nancy. (2016). Capitalism's Crisis of Care. Dissent Magazine. Diambil dari Capitalism's Crisis of Care — Dissent Magazine

Fraser, Nancy. (2016). Contradictions of Capital and Care. New Left Review. Diambil dari Nancy Fraser, Contradictions of Capital and Care, NLR 100, July–August 2016 (newleftreview.org)

Ihsanuddin. (2020, September, 2). Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19. Kompas.com. Diambil dari Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19 Halaman all — Kompas.com

Purwanto, Antonius. (2021, Januari, 27). Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020–2021. Kompas.id. Diambil dari Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020–2021 (kompas.id)

Retaduari, E.A. (2022, Maret, 2). 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19. Kompas.com. Diambil dari 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19 Halaman all — Kompas.com

Srnicek, Nick y Hester, Helen (2017) The Age of Perplexity: Rethinking the World we Knew. The Crisis of Social Reproduction and the End of Work. Madrid, BBVA, OpenMind, Penguin Random House Grupo Editorial.